

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDURRASYID
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3. NHK : 143346

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.261.325.000**

1. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 802 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 40.100.000
4. Tanah Seluas 2283 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 171.225.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150000 m2/72 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **90.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/1DY STANDARD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA HOND/CR-V RD5 2 WD 2.0 A/T Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/14D (AL115C/MIO SOUL) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **48.760.000****D. SURAT BERTHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **74.459.166****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **1.474.544.166**



III. HUTANG

Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.454.544.166

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.